

WELFARE SOCIETY DALAM PERSPEKTIF PROPHETIC WORDVIEW

Marita Fatimah

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email : marita_razak@yahoo.co.id

Abstrak

Welfare society merupakan sistem kesejahteraan sosial yang dijalankan oleh dan untuk masyarakat sipil yang beroperasi pada level lokal atau sub-nasional, yaitu bagian-bagian tertentu dari sebuah negara. Dengan menggunakan metode kajian pustaka (desk study) bahwa welfare society sebagai ujung tombak sistem kesejahteraan sosial. Realitas yang memprihatinkan dan memerlukan perhatian yaitu cara pandang masyarakat terhadap pencapaian kesejahteraan yang terlalu materialistik. Dalam perspektif prophetic wordview atau paradigma profetik bahwa perlunya tinjauan konsep kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang termuat dalam Al-Qur'an. Sebagai suatu kesimpulan bahwa pendekatan dengan paradigma profetik mempertemukan kebenaran tidak saja secara empiris – material, tapi juga aspek filosofis, ruhaniah, terdalam, di balik yang nampak, bahkan spiritual sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan manusia sebagai bagian dari “welfare society”.

Kata kunci : welfare society, prophetic wordview.

Abstract

Welfare society is a social welfare system run by and for civil society that operates at the local or sub-national level, namely certain parts of a country. By using the desk study method, welfare society is the sparehead of the social welfare system. The reality that is worrying and requires attention is that society's perspective on achieving prosperity is too materialistic. From a prophetic wordview perspective or prophetic paradigm, it is necessary to review the concept of social welfare as contained in the Al-Qur'an. As a conclusion, an approach with a prophetic paradigm brings together truth not only empirically-materially, but also philosophical, spiritual, deepest, behind the visible, even spiritual aspects so that it can realize human welfare as part of a “welfare society”.

Keywords : welfare society, prophetic wordview

PENDAHULUAN

Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia ini adalah kesejahteraan baik tinggal di kota maupun yang di desa, sejahtera lahir dan bathin. Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan sosial, material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup.

James Midgley (Midgley, 1995) menyatakan bahwa kesejahteraan tercapai apabila memiliki 3 (tiga) unsur, yaitu (1) kebutuhan terpenuhi, (2) masalah terselesaikan, dan (3) kesempatan untuk maju tersedia. Manusia adalah makhluk yang hidup dalam keberadaan makhluk lain, dan hidup berdampingan dengan sesamanya. Ia selama hidup di dunia sejak lahir sampai mati, memang tidak bisa lepas dari manusia lainnya. Karena itu manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial (yang bermasyarakat) (Kaelany, 2000). *Welfare society* digunakan untuk menyebut usaha kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat sipil (*civil society*). Jadi, *welfare society* adalah tentang sebuah sistem kesejahteraan sosial yang dijalankan oleh dan untuk masyarakat sipil (Jessen, 2019).

Realitas yang memprihatinkan dan memerlukan perhatian yaitu cara pandang masyarakat terhadap pencapaian kesejahteraan yang terlalu materialistik. Hal ini perlu dianalisa kembali konsep kesejahteraan masyarakat yang termuat di dalam Al-Qur'an. Hakikat kesejahteraan itu dapat diperoleh apabila masyarakat terbebas dari jeratan kekufuran, kemiskinan, kebodohan dan rasa takut, hal ini didapatkan apabila masyarakat memperkuat keimanan dan tidak mencampurkannya dengan segala bentuk kezhaliman lalu kemudian direalisasikan melalui amal saleh atau amal kebajikan.

METODE PENELITIAN

Di dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian literatur (*desk study*) (Suharsimi, 2002) yaitu data yang dikumpulkan dari berbagai peraturan perundang-

undangan dan pedoman, baik nasional maupun internasional, serta beberapa sumber berita di media. Berdasarkan data-data tersebut, penulisan ini berupaya memberikan tinjauan pemahaman mengenai *welfare society* dalam perspektif prophetic.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan bahwa konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai sistem kesejahteraan sosial yang tidak cukup mampu secara akurat untuk membangun kesejahteraan, hal ini disebabkan oleh sifat tersentralisasinya sistem kesejahteraan sosial. Keragaman masalah dan kebutuhan kesejahteraan sosial di tingkat lokal tidak mampu ditangani oleh sentralisasi kesejahteraan sosial yang tidak dapat memberikan keberagaman. Kesejahteraan sosial yang berkelanjutan tidak dapat dihasilkan oleh keseragaman program yang ditentukan oleh pemerintah pusat, meskipun dilaksanakan secara lokal. Oleh sebab itu diperlukan desentralisasi dalam sistem kesejahteraan sosial yang mampu mendukung partisipasi aktif masyarakat yang memiliki kemauan, kemampuan dan kemandirian untuk membangun sistem kesejahteraan sosial yang didasarkan pada masing-masing kearifan lokal di dalam sistem kesejahteraan sosial yang disebut *welfare society*.

Makna dari *welfare society* adalah masyarakat kesejahteraan. Konsep tersebut menjalankan fungsi yang sama dengan konsep *welfare state* (negara kesejahteraan), yaitu memastikan terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat. Perbedaannya dengan konsep *welfare state* adalah pada level operasionalnya. *Welfare state* beroperasi pada level nasional yang menjangkau seluruh rakyat sebuah negara, sedangkan *welfare society* beroperasi pada level lokal atau sub-nasional yang merupakan bagian-bagian tertentu dari sebuah negara.

Lokal dalam arti sebuah wilayah sub-nasional (provinsi atau kabupaten/kota) yaitu kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kebutuhan kesejahteraan yang saling berbeda satu sama lain. Masyarakat aktif adalah masyarakat yang memiliki tingkat pengendalian tinggi, yang dibarengi oleh konsensus yang juga tinggi. (Etzioni, 1967). Masyarakat aktif merupakan syarat utama dalam *welfare society* yaitu masyarakat yang mampu memahami arah pembangunan kesejahteraan sosial yang digariskan oleh pemerintah dan juga mampu memahami keunikan dan kebutuhan kesejahteraan sosial mereka sendiri, sehingga mereka mampu menerjemahkan pembangunan kesejahteraan pemerintah ke dalam konteks

lokal masyarakat bersangkutan. Masyarakat aktif adalah masyarakat yang memiliki keinginan berperan aktif dan mampu melakukannya.

Welfare society dikaitkan dengan *welfare state* (negara kesejahteraan) dalam melaksanakan peranannya maka *welfare society* dapat melakukan salah satu dari dua peran tersebut. *Welfare society* dapat menjadi alternatif bagi *welfare state* atau dapat menjadi pendamping *welfare state* dalam sebuah hubungan komplementer. Sebagai alternatif, *welfare society* diposisikan sebagai antitesa bagi *welfare state*. Dalam hal ini, *welfare society* dianggap sebagai sistem yang lebih layak dan lebih tepat untuk digunakan sebagai sarana untuk memastikan kesejahteraan bagi masyarakat (Skillen, 1985).

Hal tersebut mengakibatkan negara-negara harus memilih untuk tetap menerapkan sistem *welfare state* dalam upaya kesejahteraan sosial mereka ataukah beralih ke sistem *welfare society* yang diyakini lebih mampu menjamin terwujudnya kesejahteraan sosial dalam arti yang sesungguhnya. Sementara itu, sebagai sistem komplementer, *welfare society* dipandang sebagai sistem yang bisa digunakan secara bersamaan dengan sistem *welfare state*. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat Sejahtera, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada situasi yang aman sentosa, dan makmur. Aman berarti terbebas dari bahaya dan gangguan. Hidup yang aman menandakan suatu kehidupan yang terbebas dari segala kesukaran dan bencana. Sehingga, hidup yang sentosa adalah hidup dalam suasana aman, damai dan tidak ada kekacauan. Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah (Sodiq, 2015).

Dalam KBBI masyarakat adalah sejumlah manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama (Sugono, 2003). Menurut Charles Horton masyarakat adalah sesuatu yang menyeluruh yang mencakup berbagai bagian yang berkaitan secara sistematis fungsional (Soekanto, 1993). Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani (Dura, 2016).

Cara pandang masyarakat terhadap pencapaian kesejahteraan yang terlalu materialistik menjadikan hal yang memprihatinkan dan memerlukan perhatian. Dalam perpektif prophetic worldview, hal tersebut perlu diketahui konsep kesejahteraan masyarakat yang termuat dalam Al-Qur'an. Di dalam Al Qur'an disebutkan bahwa hubungan antar manusia yaitu adanya penciptaan Allah yang berbeda-beda dalam kehidupan manusia seperti laki-laki dan perempuan, beragam suku, berbagai bangsa, beragam bahasa, serta perbedaan warna kulit serta berbagai keanekaragaman lainnya agar manusia saling mengenal satu sama lainnya dan bukan untuk saling menyudutkan dan membuat ketersinggungan karena adanya perbedaan tersebut, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Hujurat: 13 :

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurāt 49; 13) (Kementerian Agama RI, 2015).

Dalam Islam memiliki ukuran kesejahteraan yang berbeda, hal tersebut dipahami dari ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kesejahteraan salah satunya ialah QS Al-An'am 82 :

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. Al-An'ām 6: 82) (Kementerian Agama RI, 2015).

Menurut Asep Usman Ismail (Ismail, 2012) di dalam Al Qur'an bahwa masyarakat yang sejahtera dinamakan *al-muflihūn* (المفلحون) yang secara harfiah berarti orang-orang yang beruntung bahwa indikator masyarakat sejahtera (*al-muflihūn*) yaitu *“Mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, dan mereka beriman kepada (al-Qur'an) yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dan (kitab-kitab) yang diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung (meraih kesejahteraan dunia dan akhirat)”* (QS al-Baqarah/2:4-5) (Kementerian Agama RI, 2015).

Indikator kesejahteraan lainnya sebagai rujukan sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 9 yang artinya : *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”*(Kementerian Agama RI, 2015).

Kemiskinan sebagai “lawan” dari kesejahteraan menjadikan kekhawatiran terhadap generasi yang lemah. Sehubungan dengan yang dimaksud di dalam ayat tersebut bahwa manusia dianjurkan untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiar dan bertawakal kepada Allah; Allah menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan generasi penerusnya agar tidak jatuh miskin yaitu mempersiapkan atau mendidik generasi penerusnya dengan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan moral dan material, sehingga akan menjadikan sumber daya manusia yang terampil dan memiliki *akhlakul karimah* karena generasi penerus merupakan asset sebagai generasi penerus yang kuat dalam hal ketaqwaannya kepada Allah SWT dan dalam hal ekonomi (Kementerian Agama RI, 2015).

Di dalam Al-Qur'an pada surat An-Nahl ayat 97 mengenai kesejahteraan : *“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan”*(Kementerian Agama RI, 2015).

Kesejahteraan masyarakat juga terdapat di dalam Al Qur'an Surat Al-Hadid ayat ke-20 yang artinya *“Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia Ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbanggabanggaaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamtanamannya mengagumkan para petani; Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning Kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaanNya. dan kehidupan dunia Ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu”*(Kementerian Agama RI, 2015).

Terlalu berfokus untuk mengejar kemewahan duniawi dapat menjerumuskan manusia ke dalam kesombongan kebinasaan, sebagaimana dalam Al Qur'an Surat At-

Takatsur ayat 1-2 yang artinya “*Bermegah-megahan Telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke dalam kubur*” (Ismail, 2012).

Indikator kesejahteraan yaitu tingkat pendapatan (jumlah kekayaan), kepadatan penduduk, perumahan, dan lainnya dapat mengelabui seseorang jika tidak diiringi dengan pembangunan mental atau moral yang berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan sehingga dikhawatirkan manusia akan terjebak pada persaingan kemewahan duniawi yang serba hedonis dan materialistik, maka penanaman *tauhid* (pembentukan moral dan mental) merupakan indikator utama bagi kesejahteraan (Sodiq, 2015). Ringkasnya untuk meraih kesejahteraan maka seseorang harus tetap menjaga keimanannya dan tidak mencampurkannya dengan kesyirikan.

Paradigma profetik pada akhirnya menawarkan program transformasi, yang meliputi transformasi fundamental dengan jalan integralisasi dan objektifikasi ilmu dan agama, transformasi individu dan sosial; dan transformasi struktural. Pandangan akan pentingnya keragaman dan tetap membiarkannya lestari mungkin saja dapat menjadi jawaban, akan tetapi dalam kondisi tertentu misalnya terdapat konflik yang melibatkan subyek hukum yang berlainan afiliasi normanya, tunduk pada otoritas hukum yang berlainan, maka diperlukan integrasi hukum yang disandarkan pada proses obyektifikasi (Prof Absori, 2024).

KESIMPULAN

Sistem *welfare society* sebagai suatu sistem yang diyakini lebih mampu menjamin terwujudnya kesejahteraan sosial dalam arti yang sesungguhnya. Pencapaian kesejahteraan dengan cara pandang masyarakat yang terlalu materialistik sebagai suatu realitas yang perlu menjadi perhatian bersama. Dalam perspektif paradigma profetik bahwa perlunya tinjauan konsep kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang termuat dalam Al-Qur'an. Pendekatan dengan paradigma profetik mempertemukan kebenaran tidak saja secara empiris – material, tapi juga aspek filosofis, ruhaniah, terdalam, di balik yang nampak, bahkan spiritual sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan manusia sebagai bagian dari *welfare society* sehingga terwujudnya kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian manusia dalam masyarakat (*baladun thoyyibatun wa robbun ghofur*).

Paradigma profetik tidak berhenti pada pluralisme hukum yang menghargai perbedaan sebagai suatu konstruksi sosial, akan tetapi juga melampauinya dengan jalan

integralisasi melalui kompromi hukum tersebut, pada wilayah ini tidak menjadi soal norma apa yang kemudian diterapkan selama disandarkan pada interobjektivitas yang disimpulkan dari norma-norma yang lebih dahulu objektif dan dihasilkan melalui pengalaman batin agama, kehendak-kehendak sipil, kebijaksanaan, kearifan, kekuasaan paradigma hukum dan identitas kebudayaan (Prof Absori Wordview, 2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Dura, J. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Dana Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Jibeka, 10(1), 26.
- Etzioni, A. (1967). *Toward a Theory of Societal Guidance*. American Journal of Society, 73(2), 183.
- Ismail, Asmen Usman. (2012). *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Rintisan Pembangunan Paradigma Sosial Islam yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan*. Lentera Hati, 390, 394.
- Jessen, M. H. (2019). *Rescuing Welfare Society: Political Strategies for Mobilizing Civil Society in Denmark, 2010-2018*. Dalam Voluntas: International Journal of Voluntary and Non-Profit Organizations, 30(1).
- Kaelany. (2000). *Islam & Aspek-Aspek Kemasyarakatan*. Bumi Aksara, 157.
- Kementerian Agama RI. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Al-Hadi Media Kreasi, 2, 78, 138, 278, 391, 517, 540.
- Midgley, James. (1995). *Social Development: the Developmental Perspective in Social Welfare*. Sage Publications.
- Ppt perkuliahan Prophetic Wordview, Prof Absori, *Wordview dan Hukum Profetik*, Juli 2024.
- Skillen, A. (1985). *Welfare State versus Welfare Society?*. Dalam Journal of Applied Philosophy, 2(1).
- Sodiq, A. (2015). *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*. Jurnal STAIN Kudus Equilibrium (3), 384, 394.
- Soekanto, Soerjono. (1993). *Kamus Sosiologi*. Citra Niaga Rajawali Pers, 13.
- Sugono, D. (2003). *Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 405.
- Suharsimi, A. (2002). *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktek)*. Edisi V. Rineka Cipta.